

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kerukunan umat beragama menjadi kunci terpenting dalam menjaga toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Berbagai kasus-kasus ketidakrukunan umat beragama seringkali terjadi, hal tersebut merupakan salah satu hambatan menuju negara maju. Agama merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati dan dilindungi oleh undang-undang. Pada Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Purwo Handoko, 2020).

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bahwa Pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur, karena kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Suku Badan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dan demokrasi.

Masyarakat kota Jakarta dikenal dengan masyarakat yang majemuk. Kota Jakarta merupakan tempat pertemuan manusia dengan berbagai perbedaan mulai dari latar belakang agama, sosial, budaya hingga politik. Menurut data yang dirilis

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2022, jumlah masyarakat Jakarta yang beragama Islam sebanyak 83,68%, Kristen, 8,60%, Katolik, 3,93%, Buddha 3,59 % Hindu 0,93% dan Khonghucu 0,02%. Data tersebut menerangkan bagaimana Jakarta dinilai sebagai kota yang heterogen. Dari proses dan perjalanan yang panjang, bagaimana perbedaan latar belakang tersebut masyarakat Jakarta terbiasa untuk saling berinteraksi dan hidup berdampingan. Tentunya, suasana rukun, aman dan damai menjadi dambaan seluruh masyarakat Jakarta tanpa adanya konflik, gangguan serta kesenjangan-kesenjangan lainnya.

Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah tentunya harus mengetahui dan bertanggung jawab memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Suku Badan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dan demokrasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta mempunyai beberapa fungsi, Adapun fungsi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama yaitu: 1). Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan pada lingkup Kota Administrasi; 2). Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan pada lingkup Kota Administrasi. Tujuan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merawat kerukunan hidup beragama adalah membuat masyarakat menjadi harmonis, saling menghormati, dan menghargai satu sama lain.

Adapun program dari Suku Badan Kesbangpol dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1****Tujuan, Sasaran dan Strategi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>
1	Mewujudkan Jakarta sebagai kota dengan persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh melalui budaya multikultur dengan mengembangkan aspek- aspek kebangsaan dan keberagaman	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembagunan persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh melalui budaya multikultural dengan mengembangkan aspek-aspek kebangsaan dan kebinekaan	Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2	Meningkatkan pendidikan politik masyarakat Jakarta dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam iklim yang demokratis dan kondusif	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan politik dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam iklim yang demokratis dan kondusif	Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat

**Sumber: Rencana Strategis Bakesbangpol, 2024**

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dijalankan yaitu: Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat. Dengan kedua program di atas diharapkan tidak terjadi konflik di wilayah Jakarta khususnya di Jakarta Timur.

Dari hasil observasi penulis, terdapat beberapa konflik yang terjadi yang menyebabkan program tersebut menjadi kurang efektif pada pelaksanaannya. Seperti yang dikutip dari [parahyangan-post.com](http://parahyangan-post.com) salah satu konflik yang terjadi mengenai Warga Pondok Kelapa menolak lahan ruang terbuka hijau (RTH) dibangun Gereja Presbyterian Indonesia ([parahyangan-post.com](http://parahyangan-post.com), diakses April 2024). Penolakan warga terkait kegiatan peribadatan yang mengatasnamakan Gereja Presbyterian Indonesia Jemaat Sola Gratia yang dilakukan pada tempat yang disewa dari Yayasan Bahtera Sejahtera yang berlokasi di Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur permasalahan tersebut dikarenakan alih fungsi dari tujuan awal untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak, yang pada waktu selanjutnya gedung Sekolah TK tersebut dialih fungsikan menjadi Tempat Peribadatan/ Gereja Presbyterian Indonesia Jemaat Solo Gratia. Walikota

Administrasi Jakarta Timur telah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk penghentian penggunaan kegiatan di Gedung TK. Yayasan Bahtera yang tidak sesuai peruntukannya. Sejak 2004 kegiatan di lokasi tersebut sudah vakum. Perwakilan warga meminta kepada Lurah Pondok Kelapa untuk segera mengambil tindakan, agar kegiatan peribadatan yang meresahkan warga tersebut tidak memicu permasalahan lebih lanjut, karena Pengurus Gereja telah melibatkan oknum Ormas sebagai pengamanan pada saat melakukan peribadatan, sehingga warga merasa terintimidasi dengan hal tersebut. Dengan terjadinya konflik tersebut, tindakan nyata yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur beserta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yaitu dengan mengadakan Rapat Koordinasi yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (<https://www.parahyangan-post.com/berita/detail/gereja-di-pondok-kelapa-jaktim-ditolak-warga>, 2024)

Selain konflik di atas, terdapat berbagai masalah kerukunan hidup beragama di Wilayah Jakarta Timur. Isu sensitif terkait agama dan politik identitas menguat dan merasuki masyarakat sehingga tatanan sosial masyarakat Indonesia yang ramah, santun, suka damai dan rukun dirusak oleh perilaku kekerasan, kerusuhan, aksi radikalisme, perusakan rumah ibadah, bahkan terorisme. Ada kecenderungan dan fakta yang dominan bahwa masyarakat lebih mudah memilih kekerasan sebagai solusi konflik dari pada jalan damai ketika agama dibawa dalam ranah konflik (Yohanes, 2023). Beberapa konflik yang terjadi akan mengganggu efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan programnya dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Jakarta Timur.

Pada penelitian ini, hanya membatasi mengenai sejauh mana efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di wilayah Jakarta Timur, dimana ditemukan beberapa konflik seperti penolakan warga terkait kegiatan peribadatan, memastikan kekuatan hukum mengenai legalitas pendirian gereja dengan Ormas yang menjadi backing (Pemuda Batak Bersatu dan Pemuda Pancasila) akan ditindak lanjuti dengan pemanggilan untuk klarifikasi. Selain itu Pemerintah Kota Jakarta Timur menggaungkan peningkatan kerukunan umat beragama di tengah ancaman politisasi isu tersebut

menjelang Pemilu 2024. Seperti yang dikutip oleh antaranews.com “"Kami komit untuk terus mendorong penguatan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata Wakil Wali Kota Jaktim Iin Mutmainah saat mengikuti Seminar Daring "Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Jakarta Timur 2023". Dengan adanya kegiatan itu, sebutnya, diharapkan adanya wawasan dalam pencegahan untuk tidak menimbulkan perpecahan atau friksi di masyarakat. Efektivitas organisasi dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Dengan demikian yang menjadi fokus dan tujuan dari penelitian ini adalah efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Jakarta Timur.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Terjadinya konflik terkait kerukunan umat beragama dalam kasus alih fungsi sekolah menjadi tempat ibadah.
2. Pemerintah Kota Jakarta Timur menekankan peningkatan kerukunan umat beragama di tengah ancaman politisasi isu menjelang Pemilu 2024 di wilayah Jakarta Timur
3. Terdapat masyarakat yang kurang menyadari pentingnya kerukunan umat beragama.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah guna memperkecil fokus pembahasan penelitian ini antara lain:

Penelitian difokuskan pada efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur. Penulis juga memaparkan mengenai Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan penelitian dari pembatasan penelitian di atas adalah:

1. Bagaimana efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis, antar lain:

##### **1.6.1 Secara Teoritis**

Dalam penelitian ini dapat meningkatkan kekhasan ilmu pengetahuan terutama ilmu sosial yang berkaitan dengan teori efektivitas organisasi dalam menjaga kerukunan hidup beragama.

##### **1.6.2 Secara praktis**

1. Bagi suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi sebagai dasar kajian untuk meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Jakarta Timur.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat mengenai upaya dari suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur dalam memelihara kerukunan umat beragama.